

STRENGTHENING
CIVIL SOCIETY
GLOBALLY



INDEX KEBERLANJUTAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL 2020

VERSI BAHASA INDONESIA
SEPTEMBER 2021



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

ICNL
INTERNATIONAL CENTER
FOR NOT-FOR-PROFIT LAW

fhi360
THE SCIENCE OF IMPROVING LIVES

INDEKS KEBERLANJUTAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL 2020

Indonesia

September 2021

Dikembangkan oleh:

United States Agency for International Development

Bureau for Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance

Center of Excellence on Democracy, Human Rights and Governance

Acknowledgment: Publikasi ini disusun melalui dukungan yang diberikan oleh USAID berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. AID-OAA-LA-17-00003.

Disclaimer: Pendapat yang diungkapkan di sini adalah pendapat panelis dan peneliti proyek lainnya dan tidak selalu mencerminkan pandangan USAID atau FHI 360.

UCAPAN TERIMA KASIH

Publikasi ini tidak akan mungkin ada tanpa kontribusi dari banyak individu dan organisasi. Kami sangat berterimakasih kepada mitra pelaksana kami, yang memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertemuan expert panel dan menuliskan laporan negara. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada perwakilan CSO dan expert, mitra USAID, dan donor internasional yang telah berpartisipasi dalam expert panel di masing-masing negara. Pengetahuan, persepsi, ide, pengamatan, dan kontribusi mereka adalah dasar di mana Indeks ini disusun.

MITRA LOKAL

KONSIL LSM INDONESIA

Misran Lubis
Frans Tugimin
Lusi Hertina

MANAJER PROYEK

FHI 360

Michael Kott
Eka Imerlishvili
Alex Nejadian

INTERNATIONAL CENTER FOR NOT-FOR-PROFIT LAW (ICNL)

Catherine Shea
Jennifer Stuart
Marilyn Wyatt

TIM EDITOR

Luc Chounet-Cambas, Bishnu Sapkota, Hans Antlov, Natasha Dandavati, Kate Musgrave, Julie Hunter, Linnea Beatty, Mariam Afrasiabi, Gary Bland, dan Kourtney Pompei

KEBERLANJUTAN OMS SECARA KESELURUHAN: 3,9



Ditandai dengan munculnya pandemi COVID-19, tahun 2020 merupakan tahun krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial di Indonesia.

Setelah pemilihan umum pada awal tahun 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Kabinet Indonesia Maju yang merupakan kabinet pemerintahan koalisi terbesar sejak era reformasi pada tahun 1998. Pemerintahan tetap berlangsung stabil selama tahun 2020, meskipun Indonesia digoncang gejala politik, sosial, dan ekonomi yang hebat.

Omnibus Law RUU Cipta Kerja telah memicu aksi mogok dan unjuk rasa di beberapa daerah sebagai dampak dari kritik yang disuarakan melalui media sosial. Hanya dalam hitungan hari setelah RUU Cipta Kerja pertama kali diluncurkan, sebuah petisi yang diprakarsai enam pemuka agama berhasil mengumpulkan satu juta tanda tangan yang menyerukan penolakan terhadap RUU tersebut dan menyuarakan mosi tidak percaya terhadap Presiden Jokowi. Meskipun demikian, UU Cipta Kerja disahkan pada tanggal 5 Oktober dan diundangkan pada bulan November 2020.

Pada bulan April 2020, Menteri Kesehatan mengeluarkan peraturan yang bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Alih-alih menetapkan ketentuan dalam skala nasional, peraturan tersebut memungkinkan kepala daerah untuk memberlakukan pembatasan pada bisnis, perjalanan, kebebasan berkumpul, dan kegiatan lainnya sesuai tingkat keparahan pandemi di masing-masing daerah. Peraturan tersebut juga memberikan wewenang kepada pihak militer untuk menegakkan protokol kesehatan, mengingat bahwa kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana biasanya dijabat oleh seorang jenderal aktif. Hingga akhir tahun 2020, Indonesia telah mengonfirmasi 743.198 kasus positif COVID-19 yang mengakibatkan lebih dari 22.000 kematian.

Pandemi ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian. Badan Pusat Statistik memprediksi terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,07 persen pada tahun 2020, yang merupakan penurunan paling tajam dalam dua dekade terakhir. Pada bulan Agustus 2020, angka pengangguran di Indonesia mencapai 9,77 juta jiwa, yang mengalami penambahan sebanyak 2,67 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Dana pemerintah dari sejumlah pos anggaran belanja pada tahun 2020 dialihkan untuk program tanggap darurat dan penanggulangan COVID-19. Berdasarkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan, total dana bantuan COVID-19 dari pemerintah pada tahun 2020 senilai lebih dari Rp800 triliun (\$571.428.571).

Meskipun OMS dihadapkan pada berbagai tantangan nyata selama pandemi, sejumlah OMS melihatnya sebagai “berkah terselubung” yang memacu aktivisme dan memperjelas peran kepemimpinan OMS pada masa krisis. OMS bergerak untuk membantu mereka yang terpuruk akibat tantangan yang semakin berat pada masa pandemi, menggalang dana dan dukungan bagi populasi yang rentan, serta menyalurkan bantuan tersebut secara efisien kepada mereka yang paling membutuhkan. OMS juga semakin inovatif dalam mengadaptasikan cara kerja mereka sesuai keadaan di tahun 2020 dengan beralih ke platform online untuk berbagai kegiatan, mulai dari komunikasi dengan konstituen mereka hingga penggalangan dana.

Dalam konteks ini, keberlanjutan OMS di Indonesia secara keseluruhan tidak berubah pada tahun 2020. Empat dari tujuh dimensi mengalami sedikit peningkatan—yang mencerminkan ketahanan dan responsivitas OMS selama krisis COVID-19—meskipun satu dimensi tidak mengalami perubahan dan dua lainnya menunjukkan tren menurun. Penyediaan layanan mengalami peningkatan karena OMS mampu memberikan layanan bantuan darurat secara cepat dan kolaboratif. Infrastruktur sektoral OMS juga dapat mengatasi berbagai tantangan pada tahun 2020 karena banyak OMS di tingkat nasional yang mengambil peran sebagai organisasi perantara pendukung (*ISO, intermediary support organization*), dan beralihnya kegiatan ke platform daring membuat program pelatihan lebih mudah terjangkau oleh kalangan yang lebih luas. Kapasitas organisasi juga diuntungkan oleh pertumbuhan secara online dan perluasan basis konstituensi, sementara citra OMS semakin terangkat di mata masyarakat dengan liputan media yang positif tentang aksi OMS dalam menyalurkan bantuan COVID-19. Di sisi lain, kemampuan finansial mengalami sedikit penurunan akibat krisis ekonomi yang semakin meluas. Lingkungan hukum tetap menjadi dimensi terlemah dengan agak memburuknya keadaan pada tahun 2020 karena masalah pendaftaran yang tidak konsisten, semakin banyaknya kasus penangkapan, serta penyempitan ruang kebebasan untuk berekspresi dan berserikat. Advokasi masih menjadi dimensi terkuat, dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2020 karena OMS cepat mengatasi dampak pembatasan COVID-19 dengan mengalihkan kegiatan advokasi mereka ke platform virtual.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hanya 2.031 OMS yang baru mendaftar atau memperbaharui pendaftarannya pada tahun 2020, jauh lebih sedikit daripada tahun sebelumnya. Terjadinya penurunan ini kemungkinan karena adanya kendala pendaftaran selama pandemi. Terhitung bulan November 2019, sudah ada 431.465 OMS yang terdaftar di Indonesia sehingga diperkirakan terdapat sekitar 433.500 OMS pada tahun 2020, meskipun Kemendagri belum mengumumkan data resminya untuk tahun 2020. Beberapa pemerintah daerah juga mengumpulkan datanya sendiri yang kemudian diikutsertakan ke dalam data nasional. Misalnya, terdapat 148 OMS yang terdaftar di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, dan 405 OMS di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

LINGKUNGAN HUKUM: 4,6



Lingkungan hukum untuk OMS di Indonesia agak memburuk pada tahun 2020 dan tetap menjadi dimensi terlemah dari keberlanjutan OMS. Penurunan ini dipicu oleh tiga faktor: inkonsistensi pemerintah dalam menjalankan proses hukum yang benar dan adil dalam hal pendaftaran dan pembubaran OMS; meningkatnya penangkapan aktivis OMS dan ancaman kekerasan melalui media sosial; serta menajamnya intoleransi dan politik identitas yang mempersempit ruang kebebasan berserikat dan berekspresi.

OMS di Indonesia mempunyai dua bentuk badan hukum, yakni: perkumpulan dan yayasan. Yayasan tidak memiliki anggota, sedangkan perkumpulan adalah organisasi berbasis anggota. Yayasan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan perkumpulan diatur dalam Staatsblad No. 64 Tahun 1870.

Pendaftaran OMS diatur lebih lanjut dalam Permendagri No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. OMS yang berbadan hukum harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan OMS yang tidak berbadan hukum harus memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kemendagri. Namun dalam praktiknya, banyak OMS di Indonesia yang tidak memiliki status badan hukum maupun SKT. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dari 148 organisasi, hanya 21 yang memiliki SKT dan 12 lainnya sudah berbadan hukum. Beberapa OMS yang lebih kecil di tingkat kabupaten tidak berbadan hukum hanya karena prosesnya yang berbiaya tinggi. Sementara itu, sejumlah OMS lainnya menolak untuk mendapatkan SKT karena memandangnya sebagai alat kontrol politik, dan berpendapat bahwa SKT seharusnya dihapuskan karena OMS sudah cukup diatur oleh aturan hukum lain. Beberapa OMS juga menganggap bahwa SKT atau status badan hukum hanya diperlukan untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah atau lembaga nasional dan internasional. Persyaratan untuk

mendapatkan SKT relatif sederhana dan tidak dipungut biaya, namun setiap OMS wajib memperbaharui SKT setiap lima tahun sekali.

Pada akhir tahun 2019, Front Pembela Islam (FPI) ditolak perpanjangan SKT-nya, dan pada bulan Desember 2020, Kemendagri secara efektif melarang keberadaan kelompok tersebut dengan alasan bahwa kegiatan FPI melanggar hukum dan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Pemerintah lebih lanjut menyatakan adanya keterlibatan anggota kelompok tersebut dalam tindak pidana terorisme. Pembubaran FPI dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kementerian dan Lembaga pada akhir bulan itu. Tanggapan OMS terhadap kasus ini terbelah. Beberapa setuju dengan keputusan pemerintah untuk membubarkan kelompok garis keras, sementara yang lain menekankan bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip-prinsip dan proses hukum yang benar dan adil - meskipun mereka sependapat bahwa tindakan keras pemerintah terhadap kelompok yang berbuat kekerasan adalah suatu langkah positif. Mereka juga berpandangan bahwa pendaftaran harus bersifat sukarela, sehingga tidak adanya SKT tidak cukup menjadi alasan untuk membubarkan suatu organisasi. Namun, mereka yang setuju dengan pembubaran tersebut, berpendapat bahwa FPI sebenarnya bukan OMS melainkan sebuah organisasi gerakan politik karena tidak menganut prinsip non-partisan dan non-kekerasan.

Kebebasan berekspresi menghadapi tantangan pada tahun 2020, terutama karena penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). OMS menganggap pasal-pasal dalam UU ITE tersebut terlalu fleksibel, sehingga dapat disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berbicara. SAFEnet, sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada kebebasan berekspresi, mencatat delapan puluh empat kasus pidana terhadap warga negara pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, enam puluh empat kasus berkaitan dengan pelanggaran UU No. 19 Tahun 2016, dimana sebagian besar pengaduan berasal dari pejabat pemerintah, lembaga, dan investor. Selain ancaman dari “buzzer” atau influencer media sosial, penangkapan aktivis OMS juga kian marak pada tahun 2020. Misalnya, delapan aktivis dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ditangkap karena dugaan melanggar UU ITE setelah secara terbuka mengkritik pengesahan UU Cipta Kerja.

Amnesty International Indonesia selanjutnya melaporkan empat puluh tiga insiden kekerasan polisi ketika menangani aksi unjuk rasa mahasiswa dan buruh yang menentang Omnibus Law pada bulan Oktober dan November 2020. Semakin maraknya kekerasan, ancaman, dan penangkapan terutama berdampak pada persepsi publik terhadap kebebasan berekspresi. Menurut Survei Indikator Politik Indonesia, 47,7 persen responden agak setuju bahwa warga semakin takut mengemukakan pendapat, sedangkan 21,9 persen responden lainnya sangat setuju.

Pada tahun 2020, OMS yang menangani masalah kesetaraan dan keadilan gender di Aceh dan Sumatera Barat mengalami peningkatan represi sosial dan politik serta mendapatkan intimidasi dari polisi syariah, khususnya di Aceh. Keadaan ini sangat membatasi ruang untuk mengkritik atau melakukan advokasi seputar hak-hak perempuan. Aktivis lokal melaporkan kejadian kasus pelecehan verbal serta adanya tekanan sosial dan politik untuk menyesuaikan diri, terutama dalam hal cara berpakaian, termasuk dalam mengenakan jilbab. Sering kali, situasi seperti ini berujung pada sensor diri. Pengawasan pemerintah terhadap OMS juga diperketat pada awal tahun 2020 dengan diterbitkannya Pedoman Pelaporan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Kemendagri. Pedoman tersebut dibagikan kepada gubernur dan walikota dalam rangka meningkatkan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan, menjaga perdamaian dan ketertiban, serta mencegah pendanaan terorisme. Sementara sejumlah OMS di tahun 2020 mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang adanya pedoman baru tersebut karena belum ada di antara mereka yang sudah didatangi atau dievaluasi di tahun 2020, sehingga potensi dampak dari surat edaran tersebut masih belum jelas.

OMS memperoleh pembebasan pungutan pajak atas penghasilan yang berasal dari dana hibah, donasi, dan harta warisan, serta zakat jika OMS tersebut adalah lembaga amil zakat yang disahkan pemerintah. Tata cara pengajuan permohonan pengecualian tersebut sangat birokratis dan berbelit. Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010 memberikan pemotongan pajak penghasilan secara terbatas bagi orang pribadi atau badan yang memberikan sumbangan untuk bantuan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan, fasilitas olahraga, atau pembangunan infrastruktur sosial. Namun, prosedur untuk mendapatkan potongan tersebut juga rumit, dan pihak donor berisiko untuk menjalani pemeriksaan oleh petugas pajak.

Perkumpulan tidak boleh terlibat dalam kegiatan ekonomi. Yayasan dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan mendirikan badan usaha atau menginvestasikan hingga 25 persen dari total kekayaan mereka di badan usaha. Keuntungan dari kegiatan ekonomi yayasan dikenakan pajak dan harus digunakan sepenuhnya untuk keberlanjutan program dan kemandirian finansial organisasi tersebut.

Permendagri No. 30 Tahun 2008 mengatur tata cara organisasi kemasyarakatan untuk menerima bantuan dari pihak asing. Peraturan tersebut menetapkan bahwa ormas harus terdaftar agar dapat menerima bantuan asing, dan Kemendagri harus menyetujui rencana penerimaan bantuan asing tersebut. Namun, aturan ini tidak sepenuhnya diterapkan dan sebagian besar OMS tidak mematuhi, meskipun sebagian kecil pihak donor memang mensyaratkan penerima hibahnya memperoleh persetujuan pemerintah.

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memperkenalkan cara baru pengadaan melalui swakelola yang mengatur peluang OMS untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tertentu. Upaya penanggulangan COVID-19 sebagian besar dilaksanakan melalui mekanisme tersebut dan Surat Edaran Mendagri No.440/2622/SJ tentang Kemitraan Antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan. Kebijakan-kebijakan tersebut memungkinkan keikutsertaan OMS dalam upaya penanggulangan COVID-19 pada tahun 2020. Misalnya, setelah Surat Edaran tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh mengeluarkan keputusan tentang bantuan COVID-19 yang pada akhirnya membuka jalan bagi 100 organisasi untuk mendapatkan dana khusus untuk kegiatan bantuan. Namun, banyak dari organisasi tersebut adalah organisasi mahasiswa, organisasi keagamaan, atau kelompok yang berafiliasi dengan partai politik, dan hanya sedikit OMS yang didanai melalui Keputusan Pemerintah Daerah Aceh yang dapat dianggap inklusif atau kompeten dalam pemberdayaan masyarakat.

Sejumlah OMS di tingkat nasional dan daerah memiliki kapasitas yang memadai untuk mendampingi OMS dalam proses hukum. Diantaranya adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di tingkat nasional dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di tingkat provinsi, selain Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) di tingkat nasional dan daerah.

KAPASITAS ORGANISASI: 3,8

Kapasitas organisasi sektor OMS mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2020—sebuah pencapaian yang patut dicatat, mengingat berbagai tantangan yang dialami pada tahun tersebut. Peningkatan ini terutama didorong oleh penguatan basis konstituensi OMS, termasuk melalui penggunaan media sosial dan grup WhatsApp untuk berkomunikasi dengan masyarakat selama pandemi COVID-19. Dengan semangat kerelawanan, begitu banyak aktivis OMS yang tergerak untuk menggelar aksi peduli di tengah pandemi pada tahun 2020, dan begitu banyak sumber daya OMS yang telah dialihkan untuk membantu mencegah penyebaran COVID-19. Meskipun kondisi ini menambah beban pada kapasitas OMS dalam beberapa hal, namun juga memperlihatkan responsivitas dan kekuatan hubungan mereka dengan kalangan yang memerlukan bantuan.



Masih terdapat kesenjangan yang mencolok dalam aspek kapasitas organisasi antara OMS di tingkat nasional dan di tingkat daerah, dimana mayoritas OMS yang kuat berkedudukan di Jakarta. Sejumlah OMS ini umumnya lebih mampu menggalang pendanaan dari pihak donor serta menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah dan perusahaan, yang sebagian besar juga berkedudukan di Jakarta.

Agar dapat melanjutkan kegiatan dan menjaga hubungan yang kuat dengan konstituen, banyak OMS yang memberikan bantuan secara online. Meskipun komunikasi online bersama konstituen dan mitra jaringan tidak selalu mendapatkan kualitas keterlibatan yang sama dengan komunikasi tatap muka, hal itu perlu dilakukan agar OMS tetap dapat menjangkau audiens mereka walaupun terpisah jarak, mengingat pemberlakuan pembatasan sosial selama pandemi COVID-19. Pergeseran menuju komunikasi online ini pada akhirnya mampu meningkatkan upaya pengembangan konstituen bagi beberapa OMS yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk lebih sering berkomunikasi dengan penerima manfaat mereka. Misalnya, pada bulan Agustus 2020, Sekolah Kedaulatan Agraria (SKA) menyelenggarakan dua lokakarya daring tentang masalah kedaulatan agraria dan pangan, terutama untuk mengurangi impor pangan. SATUNAMA Yogyakarta juga memberikan bantuan teknis online pada tahun 2020, khususnya yang terkait dengan program pengelolaan hutan desa di Jambi dan program sumber penghidupan di Papua Barat.

Kapasitas OMS dalam perencanaan strategis mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan diperkirakan akan terus menguat pada tahun mendatang. Misalnya, program MADANI yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh FHI 360, bekerja sama dengan setidaknya tiga puluh dua OMS di enam provinsi untuk meningkatkan kapasitas perencanaan strategis mereka serta merumuskan atau memperbarui visi, misi, dan program kerja mereka untuk tahun-tahun mendatang. Organisasi lainnya, seperti Institut Suara Kita, melakukan perencanaan strategis mereka seperti biasanya secara online.

Sebagian besar OMS memiliki struktur manajemen internal yang fleksibel berdasarkan kebutuhan program dan memiliki tanggung jawab yang terpisah secara jelas dalam hal pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tingkat keterlibatan badan pengurus bervariasi tergantung pada kebutuhan dan sumber daya dari masing-masing OMS. Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP), misalnya, menyelenggarakan Lokakarya Koordinasi Perencanaan Badan Pelaksana pada akhir tahun 2020 untuk mendukung koordinasi lintas sektoral dan komunikasi yang lebih teratur antara badan pengurus dan pelaksana organisasi. Program MADANI juga bekerja sama dengan mitra lokalnya untuk memperkuat manajemen internal melalui penyusunan prosedur operasional standar (SOP). Setiap OMS yang terlibat dalam program tersebut harus menyusun rencana pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran. OMS tidak memiliki sumber daya untuk mengukur keberhasilan mereka melalui penggunaan jasa evaluator eksternal, tetapi mereka membentuk tim internal yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi.

Masalah kepegawaian dan rekrutmen masih menjadi perhatian khusus bagi OMS. Banyak OMS yang bekerja berdasarkan proyek, sehingga sulit untuk mempertahankan staf. OMS di tingkat kota atau kabupaten umumnya cenderung tidak memiliki staf penuh waktu yang digaji, berpendidikan, dan terampil. OMS yang lebih kecil juga kurang mampu berinvestasi untuk membangun kapasitas staf mereka. Sejumlah OMS bahkan merekrut sukarelawan untuk melengkapi kapasitas staf mereka. Karena keterbatasan anggaran, beberapa OMS juga tidak mampu membayar anggota staf mereka, sehingga pada akhirnya harus menambah jumlah “sukarelawan” dan sangat bergantung pada mereka. Menurut Konsil LSM Indonesia, dari empat puluh situs web OMS, enam situs membuka lowongan rekrutmen tenaga relawan. Dalam beberapa kasus, bantuan dari relawan sangat penting bagi OMS untuk menjalankan program mereka pada tahun 2020 serta berkontribusi pada pencegahan COVID-19 dan penyaluran bantuan selama pandemi.

Beberapa OMS lokal, terutama di daerah pedesaan, masih terbatas dalam mengakses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan banyak yang tidak memiliki perangkat keras, bandwidth, dan keterampilan teknis untuk melakukan kegiatan secara online. Namun, pandemi telah mendorong terjadinya peningkatan yang signifikan dalam kemampuan teknis OMS dan pemanfaatan berbagai alat bantu online. Kegiatan rapat dan seminar yang sebelumnya mengalami kendala keuangan menjadi lebih sering dilakukan pada tahun 2020 karena bertambah banyaknya platform pertemuan online. Misalnya, Suara Kita mampu melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk konstituen, dalam proses perencanaan strategisnya secara online. OMS juga lebih intensif memanfaatkan sarana komunikasi online dan media sosial, terutama di daerah perkotaan.

KEMAMPUAN FINANSIAL: 4,4



Kemampuan finansial OMS di Indonesia kian membaik sejak tahun 2017 yang ditandai dengan semakin beragamnya sumber pendanaan. Namun, dampak finansial dari pandemi COVID-19 mengakibatkan sedikit penurunan yang tak terhindarkan pada tahun 2020.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) pada akhir tahun 2020, 72 persen OMS yang disurvei mengalami kendala keuangan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Dari kalangan OMS tersebut, 23 persen diantaranya mengatakan bahwa kesulitan keuangan mereka telah mencapai tingkat kritis. OMS yang paling terkena dampak adalah mereka yang bergerak dalam isu penguatan toleransi (52 persen) dan lingkungan (44 persen). Sejumlah OMS mengatakan lebih lanjut bahwa mereka terancam

bubar karena tidak adanya donor asing maupun donor domestik pada tahun 2020.

Dalam menghadapi berbagai masalah tersebut, OMS terus berupaya melakukan diversifikasi sumber pendanaan. Untuk dapat menghimpun dana dari masyarakat, OMS harus mendapatkan izin dari Kementerian Sosial dan melaporkan penerimaan hasil pengumpulan sumbangan di situs web atau akun media sosialnya. Selama pandemi, banyak OMS yang mengarahkan perhatian mereka ke sumber pendanaan lokal. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang sebelumnya mengandalkan uang iuran keanggotaan sebesar 1 persen dari gaji setiap anggota per bulan, mulai menggalang dana dengan berbagai cara setelah banyak pekerja yang diberhentikan selama pandemi. KSBSI antara lain mengajukan permohonan dana hibah dan meminta sumbangan makanan untuk para anggota. Meskipun KSBSI menyadari perlunya diversifikasi sumber pendanaan, upaya yang dilakukan hingga akhir tahun kebanyakan tidak berhasil. Sebaliknya, Suara Kita lebih berhasil dalam menggalang dana, dimana organisasi ini mendukung program pemberdayaan masyarakat dengan melakukan jual beli barang bekas seperti pakaian dan sepatu. Filantropi lokal juga masih menjadi sumber pendanaan yang penting, terutama oleh organisasi keagamaan seperti lembaga amal zakat nasional LAZISMU.

Untuk menerima dana dari APBN dan APBD, OMS harus berbadan hukum dan memiliki SKT. OMS menerima dana hibah pemerintah pada tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Permendagri No.123 Tahun 2018. Pemkot Tulungagung, misalnya, menyalurkan total dana hibah senilai Rp1,2 miliar (sekitar \$82.200) kepada lima puluh dua OMS pada tahun 2020. Dua organisasi di Provinsi Bengkulu masing-masing menerima dana hibah sebesar Rp1 miliar (\$68.500). Tujuh puluh tiga organisasi menerima dana hibah dari Kabupaten Tanah Laut, dengan jumlah total sebesar Rp7,3 miliar (sekitar \$500.000). Di tingkat nasional, OMS juga bersaing untuk mendapatkan dana hibah pada tahun 2020, termasuk untuk program pendidikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan total anggaran sebesar Rp595 miliar (hampir \$41 juta). Di bawah lingkup program tersebut, 156 organisasi menerima dana hibah yang nilainya berkisar antara Rp20 miliar (\$1,38 juta) hingga Rp1 miliar (\$69.000).

Munculnya pandemi COVID-19 telah mendorong pemerintah untuk menerapkan mekanisme baru penyaluran dana pemerintah kepada OMS. Hal ini merupakan sebuah perkembangan positif pada tahun yang penuh tantangan. Pada bulan Oktober 2020, Kemendagri menerbitkan Surat Edaran No. 440/5538/SJ tentang Kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Organisasi Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Kebijakan ini membuka peluang pendanaan yang sangat diperlukan OMS, dan dapat diterapkan melalui mekanisme swakelola Tipe III yang telah dijelaskan di atas sehubungan dengan pelibatan dalam pengadaan layanan pemerintah.

Kucuran bantuan asing terus mengalami penurunan sejak tahun 2008 ketika Indonesia mulai bergabung dengan G20. Pada tahun 2020, Bank Dunia menempatkan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas, yang berpotensi memberikan dampak terhadap bagaimana mitra pembangunan mendukung Indonesia ke depannya. Namun, beberapa LSM internasional dan sejumlah negara lainnya memberikan dana kepada OMS pada tahun 2020. Misalnya, Bank Dunia dan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (ICCTF) meluncurkan sebuah program untuk Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (COREM) yang berlangsung dari bulan Maret 2020 hingga Februari 2022. Pemerintah Selandia Baru memberikan undangan pengajuan proposal untuk peningkatan kapasitas, dan Uni Eropa menyalurkan dana sebesar Rp86 miliar (\$5,9 juta) kepada delapan OMS di Indonesia untuk program bantuan COVID-19. Pemerintah Jepang juga memberikan dukungan keuangan pada tahun 2020.

Pendanaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) masih umum terjadi, tetapi tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Konsil LSM Indonesia juga menemukan bahwa program CSR masih sering disalahartikan sebagai sumber pendanaan yang diperuntukkan hanya untuk program yang berhubungan langsung dengan perusahaan, bukan sebagai sarana penguatan komunitas yang lebih luas.

Bagi sejumlah OMS, pendapatan yang diperoleh masih berasal dari hasil penjualan produk dan layanan. Misalnya, lembaga Indonesian Society for Social Transformation (INSIST) memiliki toko buku, Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) menawarkan jasa konsultasi dan pelatihan, begitu juga Yayasan SATUNAMA yang menawarkan jasa konsultasi dan pelatihan serta usaha menyewakan fasilitas penginapan. Namun, peluang untuk menghasilkan pendapatan ini terbatas pada tahun 2020 karena terjadinya pergeseran ke pelatihan online dan kondisi perekonomian yang semakin lesu.

Sebagian besar OMS cukup mampu mengelola keuangannya dengan sistem manajemen keuangan yang semakin membaik, terutama di kalangan OMS yang menerima manfaat dari program peningkatan kapasitas yang didanai pihak donor. Misalnya, program MADANI berupaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan OMS lokal melalui pengembangan SOP keuangan. UU Yayasan mewajibkan yayasan yang menerima total dana senilai Rp500 juta (sekitar \$34.300) atau lebih dari negara, pihak luar negeri, atau pihak ketiga untuk diaudit oleh akuntan publik dan menerbitkan ikhtisar laporan tahunan mereka dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Namun, sejumlah OMS tidak mampu membayar akuntan publik atas jasa audit yang diberikan.

ADVOKASI: 3,2

Advokasi masih merupakan dimensi yang paling kuat dari keberlanjutan OMS dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2020. OMS mampu menyesuaikan strategi lobi dan advokasi mereka untuk media sosial, sehingga memungkinkan mereka untuk membentuk opini publik, memengaruhi pemangku kepentingan, dan ikut terlibat dalam dialog strategis melalui berbagai platform virtual. Namun, perkembangan positif ini terhalangi oleh pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19 serta semakin maraknya kekerasan, ancaman, dan penangkapan pada tahun 2020.

OMS sering dilibatkan dalam proses perancangan kebijakan di tingkat nasional dan lokal, meskipun hal ini sedikit berkurang pada tahun 2020 karena pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi COVID-19 dan kesulitan pemerintah dalam mengubah proses tersebut secara online. Banyak peraturan yang telah diberlakukan sebagai respons terhadap pandemi, tetapi sering kali dilakukan dengan partisipasi OMS yang minimal. Masalah ini sangat menonjol di tingkat lokal. Di tingkat nasional, koalisi yang digagas INFID, Sekretariat Antar Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (SEJAJAR), dan LinkLSM, berhasil mendorong terbitnya sejumlah surat edaran seputar COVID-19 yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta kemitraan OMS dengan pemerintah daerah, seperti yang dijelaskan di atas.

Agenda advokasi pada tahun 2020 didominasi oleh masalah Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang ditentang keras oleh lebih dari empat puluh OMS. Koalisi OMS di tingkat nasional dan daerah menolak tegas UU tersebut, yang telah disahkan tanpa banyak masukan yang berarti dari masyarakat. Meskipun UU tersebut bertujuan untuk mengurangi pengaturannya dan menciptakan lapangan kerja, para kritikus memperingatkan bahwa pengesahannya tidak hanya akan berdampak buruk pada serikat pekerja dan keamanan kerja, tetapi juga akan menyebabkan sentralisasi kekuasaan yang semakin besar di Indonesia, mengabaikan potensi dampak lingkungan, serta kemungkinan menyempitnya ruang partisipasi masyarakat dalam investasi dan pengembangan bisnis. Begitu RUU Cipta Kerja disahkan pada bulan Oktober dan diundangkan pada awal bulan November, kegiatan advokasi yang diprakarsai oleh sejumlah koalisi OMS meluas dari aksi unjuk rasa hingga pengajuan permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana atas gugatan tersebut pada bulan November 2020, dan kasusnya masih berlangsung hingga akhir tahun. Koalisi OMS yang beranggotakan tiga belas organisasi di bidang HAM juga menerbitkan siaran pers pada akhir tahun 2020 untuk menuntut pembatalan UU Cipta Kerja.

Namun, sebagaimana yang dibahas di atas, penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian saat mengamankan aksi unjuk rasa yang menentang Omnibus Law, serta kekhawatiran OMS akan adanya penyalahgunaan UU ITE, terutama telah memperburuk persepsi terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat pada tahun 2020. Pedoman kepolisian tentang kejahatan dunia maya yang terkait dengan COVID-19 juga mengancam kebebasan berekspresi dan kegiatan advokasi sehubungan dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi.

Pada tahun 2020, gerakan perempuan di Indonesia tetap giat melakukan kegiatan advokasi, terutama dalam mendorong pembahasan atau pengesahan berbagai agenda kebijakan, termasuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Pada bulan November 2020, berbagai inisiatif advokasi berhasil memasukkan RUU PKS ke dalam Prolegnas sebagai langkah pertama menuju pengesahan undang-undang tersebut. Gerakan perempuan juga secara aktif menuntut penolakan Omnibus Law dan RUU Ketahanan Keluarga. Kegiatan advokasi mereka pada tahun 2020 diperluas melalui platform online seperti Zoom, Google Meet, dan mediasosial.

Koalisi OMS yang peduli terhadap isu transparansi dan anggaran publik juga semakin giat melakukan advokasi pada tahun 2020 dan telah berkoordinasi untuk menyusun kertas kebijakan dan publikasi penelitian. Koalisi ini mencakup INFID, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Transparency International Indonesia (TII). Pemerintah menyambut baik peran OMS dalam mengawal transparansi anggaran publik. Pemerintah juga mengakui kekuatan koalisi OMS atas berbagai upaya sistematis mereka yang berbasis



bukti. Di tingkat nasional, transparansi proses perencanaan dan penganggaran didukung oleh Open Government Indonesia (OGI). Sebelas OMS bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Open Government Partnership (OGP). Sebagai bagian dari proses, koalisi tersebut saat ini sedang mempersiapkan Rencana Aksi OGI untuk tahun 2020-2022.

Dalam rangka memperkuat lobi dan advokasi kebijakan publik di tingkat nasional dan daerah, koalisi masyarakat sipil Civic Engagement Alliance (CEA) di Indonesia dan beberapa OMS lainnya melakukan berbagai kajian dan diskusi untuk memberikan masukan kepada pemerintah, terutama mengenai kebijakan yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Kebijakan yang dikaji pada tahun 2020 antara lain adalah Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan penerapan prinsip-prinsip bisnis dan HAM.

OMS terus memperjuangkan pemerintahan yang terbuka dan proses hukum yang benar dan adil di tingkat daerah, selain berbagai upaya lainnya di tingkat nasional. Sebagai contoh, jaringan OMS di Sulawesi Selatan di bawah koordinasi Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) telah merespons dan mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19. OMS juga giat mendampingi pemangku kepentingan di tingkat desa untuk meningkatkan partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah, dimulai dengan pelibatan perwakilan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Pada tahun 2020, lima pemerintah daerah telah ikut serta dalam forum diskusi OGI.

Pada tahun 2020, sejumlah OMS berhasil mendesak perubahan undang-undang terkait OMS. Contoh yang paling nyata adalah sebuah koalisi masyarakat sipil yang berupaya untuk membuka akses terhadap dana pemerintah untuk kegiatan penanggulangan COVID-19, yang berujung pada dikeluarkannya Surat Edaran Kemendagri No. 440/5538/SJ tentang Kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Organisasi Masyarakat pada bulan Oktober 2020. OMS juga meneruskan diskusi seputar RUU KUHP dengan membahas setiap pasal dari RUU tersebut. Pembahasan tentang RUU KUHP telah berlangsung sejak rezim Suharto jatuh dari kekuasaannya.

PENYEDIAAN LAYANAN: 3,5



Layanan yang disediakan OMS mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2020, dimana OMS telah membuktikan kemampuannya untuk memberikan layanan secara efisien dan responsif dalam situasi darurat pandemi COVID-19. OMS telah berupaya meningkatkan layanannya secara konsisten sejak tahun 2016. Namun, pada bulan-bulan awal pandemi, banyak layanan OMS yang biasanya tersedia terpaksa dihentikan. Menyadari bahwa pandemi akan terus berlanjut dan layanan reguler seperti bantuan hukum masih sangat diperlukan, banyak OMS yang berupaya untuk menyeimbangkan antara penyediaan layanan yang biasa mereka berikan dan bantuan darurat.

Respon terhadap bencana alam, dilakukan oleh OMS dengan basis jaringannya yang luas-termasuk Palang Merah Indonesia (PMI), Muhammadiyah, dan Koalisi SEJAJAR-

berperan aktif dalam mendukung upaya penanganan COVID-19 di tingkat nasional, daerah, dan desa. Bantuan yang diberikan mulai dari penyuluhan kesehatan hingga pembagian masker, perlengkapan kebersihan, dan makanan. Pada tahun 2020, PMI mengerahkan 23.000 relawan untuk upaya penanggulangan pandemi, dimana 80 persen diantaranya adalah tenaga non-medis. Selain bantuan langsung, relawan OMS dengan dukungan dari Indika Foundation telah membuat situs web KAWAL COVID-19 dimana sumber daya pemerintah dan independen dihimpun untuk menyediakan data dan informasi tentang COVID-19.

OMS juga terus mengembangkan serta memperluas kegiatan dan layanan reguler mereka, dan belajar beradaptasi dengan berbagai pembatasan yang diberlakukan akibat krisis kesehatan yang terjadi. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, antara lain, menjadi perhatian khusus selama pandemi. Pada tahun 2020, terdapat 940 kasus kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, suatu peningkatan tajam dari 241 kasus pada tahun 2019. Lembaga lain, termasuk Lembaga Bantuan Hukum-Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, mengamati peningkatan serupa dalam kasus kekerasan berbasis gender, yaitu dari 126 kasus pada tahun 2019 menjadi

510 kasus pada tahun 2020. OMS tak hentinya memberikan dukungan kepada para korban, termasuk rehabilitasi hukum, medis, dan psikologis, serta reintegrasi sosial.

OMS telah mengembangkan berbagai model pendekatan penyediaan layanan yang partisipatif, seperti *participatory rural assessment* (penilaian partisipatif dari masyarakat pedesaan) dan pemetaan sosial, untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan aktor-aktor utama di masyarakat yang dapat dilibatkan dalam program. OMS juga meningkatkan layanan yang mereka tawarkan kepada OMS lain dengan menitikberatkan pada aspek penguatan kapasitas, akuntabilitas, dan ketahanan.

OMS biasanya memberikan layanan kepada masyarakat miskin secara cuma-cuma tetapi membebaskan biaya kepada mereka yang mampu membayar. Layanan gratis ini sangat penting bagi masyarakat miskin di daerah terpencil yang seringkali kesulitan mengakses layanan dasar dari pemerintah, dan OMS terus memainkan peran penting dalam mendampingi komunitas tersebut pada tahun 2020. Selama pandemi, OMS mengoptimalkan layanan online mereka, termasuk pelatihan bagi sesama OMS dan masyarakat, sehingga dapat memperluas jangkauan. Misalnya, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara menyelenggarakan pelatihan paralegal dasar bagi 138 peserta dan memberikan pelatihan paralegal tingkat lanjut bagi 66 peserta. Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali juga meresmikan 121 Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa pada bulan Juni 2020.

Pemerintah telah menyuarakan apresiasinya terhadap upaya OMS dalam menangani sejumlah permasalahan. Misalnya, pemerintah memberikan penghargaan KALPATARU kepada beberapa aktivis OMS atas upaya pelestarian lingkungan hidup yang telah mereka lakukan. Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) juga memberikan penghargaan kepada dua puluh tiga OMS atas upaya mereka dalam menangani masalah pekerja anak pada tahun 2020. Pemerintah juga mengapresiasi dukungan dan aksi OMS dalam upaya penanggulangan COVID-19, dan hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kemendagri yang mendorong kerja sama antara pihak OMS dan pemerintah daerah.

INFRASTRUKTUR SEKTORAL: 3,9

Meskipun di tengah pandemi COVID-19, infrastruktur pendukung sektor OMS di Indonesia telah mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2020. Banyak OMS nasional telah mengambil peran sebagai ISO, sementara peralihan ke *platform online* memungkinkan kegiatan pelatihan untuk menjangkau kalangan yang lebih luas.

OMS di tingkat nasional tetap menjalankan perannya sebagai pusat sumber daya (*resource center*), pemberi hibah, dan perantara yang menyalurkan dana internasional ke berbagai OMS di daerah. Organisasi yang berperan sebagai ISO di tingkat nasional antara lain adalah Penabulu, Permampu, Bakti, Kapal Perempuan Institute, FITRA, dan Konsil LSM Indonesia. Mereka yang bertindak sebagai perantara internasional termasuk SNV Netherlands Development Organization, Interchurch Organization for Development Cooperation (ICCO), dan Yayasan FIELD (Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy) Indonesia. Organisasi-organisasi ini memberikan dukungan dan pelatihan untuk pengembangan kapasitas organisasi dan kolaborasi program, serta menangani sejumlah isu terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi, lingkungan dan perubahan iklim, transparansi anggaran, kesetaraan gender, dan banyak lagi. SEJAJAR juga memfasilitasi pertemuan nasional pada tahun 2020 untuk meningkatkan kapasitas OMS, khususnya sehubungan dengan upaya advokasi bersama, koordinasi dengan otoritas pemerintah, dan dukungan terhadap upaya penanggulangan COVID-19. Beberapa organisasi lokal memberikan dana hibah kepada berbagai OMS pada tahun 2020. Yayasan Tifa menyalurkan dana asing untuk mendukung upaya penguatan kapasitas bagi para mitra yang bekerja di bidang transparansi, inklusi, dan keadilan. Yayasan Penabulu memberikan dana hibah sebesar EUR 500.000 untuk program dana hibah kecil dan EUR 1 juta untuk dana hibah mikro. Melalui penggalangan dana lokal, Indonesia untuk Kemanusiaan (IKA) memberikan dukungan keuangan kepada organisasi yang melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan.



Berbagai koalisi OMS tetap kuat pada tahun 2020, dan menjalin kolaborasi untuk memperjuangkan berbagai agenda. Dalam rangka melanjutkan upaya mereka sejak tahun 2019, sekitar empat puluh OMS bergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) untuk melakukan advokasi menolak Omnibus Law. Selain itu, koalisi OMS lainnya yang menyatukan OMS, akademisi, dan mahasiswa serta alumni Universitas Indonesia bergerak untuk mendukung pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Koalisi LSM untuk Kelautan dan Perikanan (KORAL) dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Energi Bersih juga terlibat dalam kegiatan advokasi dan diskusi kebijakan pada tahun 2020.

Dalam menyikapi pemberlakuan pembatasan sosial selama pandemi COVID-19, berbagai organisasi yang menyediakan pelatihan, bantuan teknis, dan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada OMS, telah mampu beralih ke metode online pada tahun 2020, sehingga menjangkau lebih banyak peserta di berbagai daerah. Beberapa pelatihan berbasis proyek, sedangkan yang lainnya berlangsung secara reguler. Communication for Change (C4C), dengan dukungan dari Ford Foundation, membantu OMS untuk meningkatkan kemampuan strategi komunikasi mereka. Sebagaimana disebutkan di atas, program MADANI juga memperkuat kapasitas organisasi OMS pada tahun 2020 dengan menjangkau tiga puluh dua OMS di beberapa wilayah. HukumOnline.com menyediakan klinik dan pelatihan online tentang hukum dan HAM, dan C4C kerap membuka berbagai kesempatan pelatihan untuk OMS, termasuk dalam hal komunikasi dan publikasi. Sementara itu, KSBSI aktif memperkuat kapasitas pengurus serikat pekerja di daerah dalam bernegosiasi dan melakukan advokasi. Meskipun berbagai peluang ini tersedia melalui metode inovatif, sejumlah OMS lokal masih kesulitan untuk mengakses pelatihan yang diperlukan karena tidak semuanya diberikan secara gratis. Pelatihan tentang isu-isu tertentu, seperti pengembangan konstituen dan penguatan Dewan Pengurus (Board) masih belum tersedia di Indonesia.

Kolaborasi multipihak antara OMS, pemerintah, dan sektor swasta terus mengalami peningkatan pada tahun 2020, khususnya seputar agenda lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan tata kelola pemerintahan. Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI), *World Wildlife Fund Indonesia* dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) aktif bekerja sama dalam program *Implementation on sustainable financing for improving the non forest timber product.*, sedangkan *SOMPO Environment Foundation* menawarkan program magang sukarelawan bagi OMS yang menangani masalah lingkungan hidup. Berbagai upaya terkait Open Government Partnership (OGP) juga mendorong aksi kolaborasi pada tahun 2020, dan lima pemerintah daerah bermitra dengan OMS melalui *platform OGP*. KSBSI bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk mendorong hubungan industrial yang lebih harmonis, khususnya melalui pelatihan keterampilan negosiasi bagi serikat pekerja dan anggota KSBSI. Forum CSR semakin memperkuat kemitraan lintas sektoral di tingkat nasional dan daerah, terutama untuk program terkait pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), pengentasan kemiskinan, dan pembangunan inklusif.

CITRA DI MATA PUBLIK: 4,0



Citra OMS di mata masyarakat mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2020 yang didorong oleh liputan media *mainstream* dan strategi komunikasi online OMS yang membaik secara signifikan.

Kegiatan OMS—khususnya terkait penanganan COVID-19—diliput oleh berbagai media nasional dan daerah, secara online dan di saluran televisi. OMS yang bergerak di bidang advokasi lingkungan hidup memperoleh liputan nasional dari Kompas, Tempo, dan media lainnya, sedangkan kegiatan LBH APIK Jakarta diliput oleh Tribun Network. Selain memberitakan berbagai kegiatan OMS, Kompas melakukan survei tentang cara memperkuat gerakan masyarakat sipil di Indonesia.

Selain itu, OMS telah meningkatkan kemampuan mereka untuk memanfaatkan TIK dan media sosial. Hal ini sangat

penting mengingat pemberlakuan berbagai pembatasan selama pandemi COVID-19. WhatsApp, Facebook, dan Instagram merupakan tiga aplikasi ponsel paling populer, dan OMS berupaya untuk memperkuat kehadiran media sosial mereka agar dapat lebih mempromosikan kegiatan mereka dan membangun jaringan pada tahun 2020. Upaya ini semakin berpengaruh karena akses internet di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada bulan November

2020, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 196,7 juta orang, yaitu melonjak drastis dari 23,5 juta pada tahun 2018.

Berdasarkan survei Edelman Trust Barometer, persepsi publik terhadap OMS tidak mengalami perubahan pada tahun 2020, dimana 68 persen responden menyatakan bahwa mereka memercayai OMS. Tingkat kepercayaan terhadap OMS masih lebih rendah dibandingkan tingkat kepercayaan terhadap bisnis (79 persen), pemerintah (75 persen), dan media (69 persen). Beberapa OMS diduga telah memeras lembaga pemerintah daerah sehingga memicu ketidakpercayaan publik. Aksi demonstrasi menentang Omnibus Law pada tahun 2020 yang sebagian besar dimotori oleh OMS, terkadang juga berujung pada kerusuhan, yang kemudian semakin menyulut ketidaknyamanan publik terhadap aktivitas OMS.

Upaya pemerintah untuk berkolaborasi dengan OMS dalam penanganan COVID-19 didasari oleh persepsi positifnya terhadap berbagai upaya yang dilakukan OMS pada tahun 2020. Dalam menghadapi tantangan tahun 2020, pemerintah semakin menyadari bahwa peran OMS dan layanan yang mereka berikan tidak hanya bermanfaat, tetapi juga sangat diperlukan. Pihak pemerintah, sektor swasta, dan akademisi juga mulai berpaling ke pegiat OMS untuk memanfaatkan keahlian mereka di berbagai bidang seperti hak-hak disabilitas, kesetaraan gender, dan pendidikan.

Banyak OMS yang sudah memiliki kode etik, tetapi kebanyakan gagal menerapkan dan menegakkannya secara konsisten. Pada tahun 2020, CRS Indonesia berupaya meningkatkan perilaku dan etika OMS melalui pelatihan dan mentoring bagi sepuluh lembaga mitranya. Hanya sebagian kecil OMS yang menerbitkan laporan tahunan, dan sebuah survei yang dilakukan Konsil LSM Indonesia menemukan bahwa hanya enam dari empat puluh situs web OMS yang secara rutin menerbitkan laporan tahunan selama tiga tahun terakhir. Beberapa OMS lainnya juga menerbitkan laporan tahunan dalam beberapa tahun terakhir, namun tidak secara berkala.

Peringatan (Disclaimer): Opini yang dikemukakan di sini adalah opini dari para panelis dan peneliti proyek lainnya, dan tidak selalu mencerminkan pandangan dari USAID atau FHI 360.

U.S. Agency for International Development

1300 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20523

Tel: (202) 712-0000

Fax: (202) 216-3524

www.usaid.gov